

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A.A.G. Wicitra Et. Al., Problematika UU No. 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Indonesian Center for Environmental Law.
- Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Sinar Grafika, Jakarta: 2018.
- Bernard L. Tanya, Ed. All, *Teori Hukum Strategi tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2010.
- Bernard L. Tanya, *Politik Hukum: Agenda Kepentingan Bersama*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2017.
- Dewa, M. J. (2022). *Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Pelayanan Publik*. Yogyakarta: KBM Indonesia, 2022.
- Hans Nawiasky, 1948 “*Allgemeine als recht System Lichen Grundbegriffe*”, (ensiedeln /Zurich/koln, benziger, cet. 2 1948)
- Hotma P. Sibuea, *Ilmu Politik Hukum Sebagai Suatu Cabang Ilmu Pengetahuan*
- Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Depok: Penerbit Prenadamedia Group, 2016.
- Kaharuddin. *Ilmu Peraturan Perundang-Undangan. Pemahaman Dasar dan Struktur Hukum*. Edisi 1. Jakarta. Kencana. 2025.
- Khusnul Ramadhani, 2023, dkk, *Aspek Hukum Pertambangan dan pengelolaan Lingkungan Hidup*, PT Dewangga Energi Internasional, PT Dewangga Energi Internasional Anggota IKAPI, 2023.

Imam Syaukani dan A.Ahsin Thohari, *Dasar-dasar Politik Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Iwandy Arif, *Batubara Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 2014.

Maria Farida Indrati Soeprapto, 2010, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2010.

Moh. Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.

M.R.D. Barid, Et. Al., 2019, *Teori dan Konsep Pembentukan Perundang-Undang Di Indonesia*, Penerbit CV. Zigie Utama, Kota Bengkulu, 2019.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penulisan Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2010

Peter Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2011

Rifa'i Abu bakar, "*Pengantar Metodologi Penelitian*", SUKA-Press, Yogyakarta, 2021.

Salim HS., *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2009.

## **B. Peraturan Perundang-Undang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.



Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

### **C. Jurnal**

Aprilia, Noldy Mohede, Carlo A. Gerungan, 2025, "Tinjauan Hukum Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara Oleh Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024". *JURNAL FAKULTAS HUKUM UNSRAT* Vol. 15 No. 4 : Lex Privatum

Afifudin Nur Rosyid Astinda, Wahyu Pujo Pratama, Muhammad Bagas Haidar. 2024, "Konflik Regulasi dan Masalah Kelayakan pada Kebijakan Izin Usaha Pertambangan bagi Ormas Keagamaan". *Jurnal USM Law Review*. 7 (3).

Ahmad Redi, Luthfi Marfungah, 2021, "Perkembangan Kebijakan Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia", *Jurnal Hukum*, Vol. 4 No. 2.

Ahmad, Risno Mina, Nasrun Hipan, Firmansyah Fality, 2023, "Penguasaan Negara atas Usaha-Usaha Pertambangan Mineral di Indonesia", *Jurnal Yustisiabel*, Vol. 7, No. 1.

- Ali Gilang, 2025, "Politik Hukum dalam Legislasi Nasional: Studi Kritis terhadap Proses dan Arah Pembentukan Undang-Undang di Indonesia", Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, Vol. 5 No.2.
- Anggawira, Rahmat Dwi Putranto, 2025, "Analisis Yuridis Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Organisasi Masyarakat Keagamaan Dan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara", Iblam LAW Review, Vol. 5, No. 2.
- Amanda Syafani Al Ikhsan Hasibuan, et al, 2025, "Pemberian WIUPK kepada Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan: Analisis terhadap UU Minerba dan PP Nomor 25 Tahun 2024", Jurnal Ilmu Hukum, Vol.9, Issue.4.
- Atsari A. S., & Wanusmawatie, 2025, "Analisis Kebijakan tentang Klientelisme dalam Pemberian Izin Tambang untuk Ormas Keagamaan di Indonesia", Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, Vol. 5, No, 2.
- Dominikus Zinyo Darling, 2025, "Kajian Teologis Terhadap Kebijakan Konsesi Tambang Oleh Ormas Keagamaan dalam Terang Ensiklik Laudato Si", Jurnal Akademi, Vol. 24, No.2.
- Erwiza Erman, 2010, "Aktor, Akses, dan Politik Lingkungan di Pertambangan Timah Bangka", Masyarakat Indonesia, Vol. 36, 2.
- Ferry Irawan Febriansyah, 2016, "Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", Perspektif, Volume XXI No. 3.
- Friskilia Junisa, Dientje Rumimpunu, & Sarah Roeroe, 2022, "Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Di Indonesia". Volume, 10, Nomor 3,.
- Geby Bernike, Devi Ervina, Shannia Angelia, 2024, "Tinjauan Yuridis Pemberian Izin kepada Ormas Keagamaan dalam Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024" Padjadjaran Law Review Volume 12, Nomor 2.

- Hartati, 2012, “Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara”, *Masalah-Masalah Hukum*, Vol 41, Nomor. 4.
- Herlindah, Rohmah, S., Mushoffa, I., & Kodir, A. 2023. “*The Deconstruction of Nahdatul Ulama Activitist Against The Concept of Agrarian Reform Based on Fiqh of Priorities.*” *Jurisdiction: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 14(1), Article 1.
- Jackson, K. 2024. “*University of Cincinnati College of Law Scholarship and The Theories of Corporate Personhood and Their Three False Choices : Developing a Framework for Corporate Rights The Theories of Corporate Personhood and Their Three False Choices : Developing a Fra.*
- Joan Kuyek, 2005, “*Canadian Mining Law and the Impacts on Indigenous Peoples Lands and Resources*”. *Backgrounder for a presentation to the North American Indigenous Mining Summit.*,
- K. M. E. Ferdi Et. Al., 2025, “Analisis Perancangan dan Substansi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam perspektif Ilmu Perancangan Perundang-undangan”, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 9 No. 3.
- Lira Arimbi Kusyanti, Slamet Suhartono, 2024, “Pengaturan Kewenangan Pemerintah Daerah Kab/kota dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara”, *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol 4 No 12.
- Marzuki, P. M. 2021 “Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*”, Vol. 18, No. 1.
- Rahmat Bijak Setiawan Sapii, Fikri Rafi Musyaffa Abidin, Syalaisha Amani Puspitasari, 2024, “Ambiguitas Pengaturan Penawaran WIUPK Secara Prioritas Terhadap Badan Usaha Milik ormas keagamaan”, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 11, No. 1.
- Rika Putri Wulandari, Muhammad Helmi Fahrozi, 2021, “Politik Hukum Pengalihan Izin Pertambangan pada Pemerintah Pusat Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah”, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol. 8 No. 1.

Risky Putra Nanggala, “Mekanisme Pemberian Izin Usaha Pertambangan Batubara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara”.

Shinta Laura Federova, Ananda Mustika Prameswari & Thifal Anjani, 2022, “Problematika Pemberian Kewenangan Izin Usaha Pertambangan Kepada Organisasi Masyarakat Keagamaan”, Jurnal Ilmu hukum, Humaniora dan Politik, Vol. 5, No. 3.

Sri Nurnaningsih Rachman & Melki T. Tunggati, 2024, “Kontradiksi Pengaturan Penawaran Prioritas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Terhadap Badan Usaha Milik Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan”.(Jurnal Ilmu Hukum) “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1.

Steven Paulus, Hartanto, 2024, “Problematika Perubahan Undang-Undang Tentang Mineral Dan Batu Bara”, Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol.2, No.3.

Sudaryat, 2020, “Tanggung Jawab Pemegang Saham Mayoritas Yang Merangkap Sebagai Direksi Terhadap Kerugian Pihak Ketiga Akibat Perbuatan Melawan Hukum Perseroan”, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 4, No. 2.

Sukandar Rumidi, 2018, *Batubara Dan Manfaatnya: Pengantar Teknologi Batubara Menuju Lingkungan Bersih*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.

Syahrani, A., 2018, “Naskah Akademik dan Implikasinya dalam Legislasi”. Jurnal Hukum Universitas Mulawarman, Vol. 5, No. 1.

T. Ade Surya & Audry Amaradyaputri Suryawan, 2024, “Pelibatan Ormas Keagamaan Dalam Pengelolaan Tambang”. (Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis. Vol. XVI, No. 15/I/.

Tri Hayati, 2019, “Hak Penguasaan Negara Terhadap Sumber Daya Alam Dan Implikasinya Terhadap Bentuk Pengusahaan Pertambangan”, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol 49 nomor 3.

Victor Imanuel, 2012, “Hak Menguasai Negara Atas Mineral dan Batubara Pasca Berlakunya Undang-Undang Minerba”, Jurnal Konstitusi, Vol. 9, No. 3.

Wasis Susetio, Rizka Amelia Azis, Nurhayani, 2021, “Penerapan Model Analisa Peraturan Perundang-undangan di Sektor Pertambangan”, Lex Jurnalica, Volume 18 Nomor 1.

W.E.S Yulia., Et. Al., 2025, “Ormas Keagamaan Jadi Korporasi: Politik Hukum di Ujung Tambang, Jurnal LITIGASI, Vol. 26.

#### D. Website

Muhsin Aseri, “Ilegal Mining dalam Perspektif Hukum Islam”  
<https://repository.radenfatah.ac.id/10405/4/BAB%20V%20.pdf> diakses pada 20 Agustus 2025, Jam 14.00

Sekretaris Jenderal MPR RI, <https://setjen.mpr.go.id/> 2019 diakses pada 2 Oktober 2025, Jam 16.13.

Ferry Syam Setyawan, “Sejarah Pertambangan di Indonesia”,  
<https://ferrysyamlawyer.com/regulasi-pertambangan-di-indonesia/>, di akses 5 Januari 2026, Jam 17.35

Raja Eben Lumbanrau, “Di mana ada tambang di situ ada penderitaan dan kerusakan lingkungan', nelangsa warga dan alam di lingkaran tambang”,  
<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia57346840> , dikunjungi pada tanggal 9 Februari 2026 Jam 16.19

Rilo Pamudi, “Publik Ragu soal Kapasitas Pengelolaan Tambang, Ketum PBNU: Kita Sudah Punya Kapasitas Profesional Untuk Itu, Ga Percaya?”, 2024,  
<https://www.tvonenews.com/ekonomi/218574-publik-ragu-soal-kapasitas-pengelolaan-tambangketum-pbnu-kita-sudah-punya-kapasitas-profesional-untuk-itu-ga-percaya?page=all> diakses pada 12 Januari 2026.

Roy T Pakpahan, “Analisis Hukum Revisi UU No 4/2009 Minerba, Kontroversi & Dampaknya”, <https://law-justice.co/artikel/182314/analisis-hukum-revisi-uu->

[no-4-2009-minerbakontroverisi--dampaknya/](#), di akses 15 Januari 2026, Jam 12.24

Siaran Pers WALHI, Putusan MK Memperkokoh Kepentingan Oligarki Tambang dan Mengancam Hidup Rakyat. <https://www.walhi.or.id/putusan-mk-memperkokoh-kepentingan-oligarki-tambang-dan-mengancam-hidup-rakyat>  
Diakses pada 11 Januari 2026, Jam 20:47.

Syofiarti, S. “Peran Serta Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan pada Kegiatan Pertambangan untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan”. 2022. <https://doi.org/10.24246/jrh.2022.v7.i1.p19-36> di akses 15 Januari 2026, Jam 12.30.

T. Ade Surya, “Polemik Prioritas Penawaran WIUPK Kepada ormas keagamaan”, 2024, [https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu\\_sepekan/Isu%20Sepekan---I-PUSLIT-Juni-2024-247.pdf](https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---I-PUSLIT-Juni-2024-247.pdf) . Diakses pada 11 Januari 2026, Jam 14.36.

#### **E. Dokumen Lainnya**

Chelvia Yundra, 2023, Politik Hukum Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan” Skripsi, Universitas Andalas, Padang.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2025, Naskah Akademik RUU Pertambangan Mineral dan Batubara, Jakarta.

Muhammad Ibrohim Azam, 2025, “Pemberian Izin Tambang Kepada Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara”, Skripsi Universitas Islam Negeri Jakarta.